



APBN

PENGEMBANGAN UMKM NKRI

Laporan Riset Dr Jan Hoesada

PENDAHULUAN

- UU Kesejahteraan Sosial dan *IPSAS Social Benefit* terkait pada makalah ini.
- Salah satu program utama Kabinet Prabowo adalah pengembangan UMKM. Hingga November 2024, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 3,7 persen (*year on year/yoy*) dengan total nilai Rp1.405,1 triliun, melambat dibandingkan Oktober 2024 yang tercatat sebesar 4,6 persen.
- Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), kredit kepada UMKM menunjukkan tren melambat pada akhir 2024. Kredit usaha mikro misalnya, hanya tumbuh 3,1 persen (*yoy*) dengan nilai Rp638 triliun, turun dari 4,4 persen, pada Oktober 2024.
- Begitu juga dengan kredit usaha menengah mengalami kontraksi sebesar -0,9 persen dengan total pembiayaan Rp307,5 triliun.
- Dari beberapa segmen itu, hanya kredit usaha kecil tumbuh relatif stabil sebesar 7,5 persen (*yoy*) dengan nilai Rp459,6 triliun.
- Pada sisi penggunaan kredit, pertumbuhan kredit investasi UMKM mencapai 11,9 persen. Sementara itu, kredit modal kerja hanya tumbuh 0,9 persen.

Anissa Kinaya Maharani , 2024, menyajikan artikel berjudul UMKM di Indonesia Menjamur, 65% Pemiliknya adalah Perempuan, antara lain mengungkapkan bahwa Usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia didominasi oleh perempuan, sebagian besar berada di sektor makanan dan minuman (F&B).

- **Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan urat nadi perekonomian global, mencakup hampir 90% dari seluruh bisnis dan mempekerjakan sekitar setengah dari angkatan kerja global.**
- Indonesia sendiri sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 275 juta jiwa memiliki 65 juta UMKM. Sektor ini berkontribusi terhadap 60% produk domestik bruto (PDB) nasional, setara dengan Rp9,6 triliun.
- Sebagian besar lanskap dari sektor UMKM ini didominasi oleh perempuan, yaitu mencakup 64,5% dari total UMKM. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan data global, yaitu hanya satu dari tiga UMKM yang dimiliki oleh perempuan.

- Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Stellar Women dan survei Boston Consulting Group memaparkan bahwa sektor makanan dan minuman (F&B) menjadi jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh pengusaha perempuan. Hal ini diasumsikan karena pengusaha perempuan tampaknya tertarik pada industri yang mereka rasa nyaman untuk dikelola secara *end-to-end*.
- Usaha jasa atau pelayanan di peringkat kedua, kemudian disusul oleh *fesyen* dan tekstil pada peringkat ketiga.
- Sementara itu, perempuan pengusaha (UMKM) pada survei terbagi hampir sama antara mereka yang pernah bekerja dan mereka yang bukan angkatan kerja. Perbedaan motivasi antara kedua kelompok ini sangat kecil, karena pendapatan dan penyaluran semangat mereka merupakan dua motivator utama di kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa, terlepas dari status pekerjaan mereka sebelum berwirausaha, perempuan di Indonesia memiliki aspirasi dan motivasi yang sama dalam memulai usaha.
- Meski demikian, UMKM perempuan di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam kepemilikan bisnis yang mencakup berbagai aspek, seperti tidak adanya akses untuk mendapatkan *mentorship*.

Salah seorang pengusaha UMKM sekaligus penemu Cassaplast Bioplastic, Cacah Samsiah, mengaku telah menyadari pentingnya hal ini, “Saya mengambil banyak kelas seperti keterampilan komunikasi, bisnis digital, (dan) kelas apa pun yang akan saya ikuti. Saya mencoba meningkatkan diri saat bergabung komunitas ini. Semakin banyak Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki bisnis dan tantangan yang sama, (semakin) dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian Anda untuk maju,” ujarnya, dikutip dari pembahasan hasil penelitian.

Namun, terdapat permasalahan yang lebih mendalam dan sistemik juga, seperti ekspektasi dan bias masyarakat, yang juga perlu diatasi di seluruh spektrum sosio-ekonomi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang benar-benar inklusif.

Sebagai informasi tambahan, responden dari survei ini sebagian besar terdiri dari perempuan berusia 25-49 tahun dengan usia rata-rata 34 tahun. Khususnya, 83% dari operasi bisnis perempuan pengusaha sebagian besar terpusat di provinsi-provinsi terkemuka di Jawa, termasuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Jawa Barat. Konsentrasi ini sejalan dengan status Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB negara sebesar 56%.

ArtikelUMKMContent DigitalTechUsaha Mikro, 2025 berjudul**Tantangan dan Peluang UMKM Indonesia di Tahun 2025**, antara lain mengungkapkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, **menyumbang sekitar 97% tenaga kerja, menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB), dan 15,5% ekspor. Diluar Usaha Besar dan perusahaan masuk bursa, UMKM Indonesia mendominasi dunia usaha NKRI , mencapai 99,99% dari total pengusaha,** dengan jumlah yang fantastis, yaitu 64,2 juta unit, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak di ASEAN. Tantangan dan Peluang UMKM Indonesia di Tahun 2025.

Sebesar 68% UMKM memiliki omzet tahunan di bawah Rp 50 juta, serta 31% usaha mikro yang laba bersihnya masih di bawah Rp 1 juta per bulan.

Memasuki tahun 2025, berbagai tantangan besar diprediksi akan dihadapi oleh UMKM Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya akan mencapai 3,2%, dan risiko geopolitik serta potensi perang dagang dapat mempengaruhi pasar komoditas global, yang berimbas pada ekonomi Indonesia dan UMKM di dalamnya. Berikut adalah enam tantangan utama yang dihadapi UMKM di tahun 2025:



1. Penurunan Daya Beli: Terutama dari masyarakat kelas menengah yang menjadi penyumbang 60% konsumsi domestik.

2. Melemahnya Ekspor: Dampak dari penurunan daya beli dunia, konflik perdagangan, dan ketegangan geopolitik.

3. Meningkatnya Non-Performing Loan (NPL): Hal ini dapat menyebabkan kesulitan

dalam pertumbuhan kredit bagi UMKM.

4. Perubahan Iklim: Berpengaruh pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya operasional UMKM.
6. Lemahnya Kompetensi Digitalisasi: Banyak UMKM yang belum optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, UMKM Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan, terbukti dari kemampuan mereka bertahan pasca-pandemi. Untuk itu, ada lima strategi yang wajib dilakukan oleh UMKM untuk menghadapinya, antara lain:

1. Inovasi Usaha: Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pelanggan agar dapat bersaing lebih optimal.
2. Digitalisasi: Menggunakan platform digital sebagai sarana pemasaran dan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan konten beredukasi.
3. Pengelolaan Keuangan yang Bijak: Melakukan efisiensi tanpa mengurangi kualitas produk, serta berhemat dalam berbagai aspek.

4. Kemitraan: Membangun kemitraan strategis untuk memperluas jaringan pasar dan memperkuat informasi.
5. Pengembangan Kompetensi: Terus belajar dan berinovasi dalam berbagai aspek usaha untuk tetap relevan di pasar.

Selain tantangan, tahun 2025 juga menawarkan berbagai peluang besar bagi UMKM Indonesia. Beberapa peluang tersebut antara lain:

- Program Pemerintah: Seperti Asta Cita yang mendukung UMKM, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan rumah murah, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
- Hilirisasi Sektor Ekonomi: Di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang memberikan peluang bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok global.
- Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Sebanyak 40% dari anggaran ini akan dialokasikan untuk UMKM.
- Ruang Publik untuk UMKM: Pemerintah menyediakan 30% ruang publik untuk penjualan dan promosi produk UMKM.
- Akselerasi Ekonomi Digital: Pemerintah memberikan prioritas pada pengembangan UMKM dan ekonomi digital, yang menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang melalui platform digital.

Dengan berbagai peluang tersebut, optimisme terhadap pengembangan UMKM di Indonesia tetap tinggi. Tahun 2025 akan menjadi saat yang tepat untuk membuktikan ketangguhan UMKM dalam menghadapi tantangan dan meraih keberhasilan. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, serta usaha keras dari pelaku UMKM akan memastikan masa depan yang cerah bagi perekonomian Indonesia.

Redaksi BisnisKUMKM , 2024, menyajikan artikel **UMKM Outlook 2025**, sumber Post Tags: #ABDSI#Bahrul ulum PLUT#digital#Kementerian UKM#outlook 2025#UMKM, antara lain mengungkapkan bahwa menjelang tahun 2025 menjadi momentum melakukan proyeksi atau “outlook” ekonomi, memberikan gambaran masa depan ekonomi sekaligus pedoman bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sorotan pada sektor UMKM tidak lepas dari peran strategis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam perekonomian global, nasional dan lokal.

Data Bank Dunia menyebutkan jumlah UMKM mencapai 95% dari total pelaku usaha global, menyumbang 35% PDB dunia, dan menyerap 50% tenaga kerja.

Di Indonesia sektor UMKM telah menjadi pilar utama ekonomi dengan

- jumlah mencapai sekitar 66 juta unit pada tahun 2023,
- memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 61% atau sekitar Rp 9.580 triliun.
- Selain itu, sektor ini juga menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, yang setara dengan 97% dari total tenaga kerja nasional.

Menyongsong tahun 2025, sejumlah harapan dan optimisme penguatan UMKM yang lebih tangguh dan berdaya saing. **Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pertumbuhan sektor UMKM, sebagaimana dalam**

poin ketiga Asta Cita, yaitu meningkatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas, mendorong semangat kewirausahaan, memajukan sektor industri kreatif, dan terus

mengembangkan infrastruktur. Demikian juga kebijakan penghapusan utang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 patut diapresiasi.

Pembentukan kementerian khusus UMKM diharapkan dapat meningkatkan fokus dan alokasi sumber daya bagi sektor UMKM.

- Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, merencanakan 9 (Sembilan) langkah strategis pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2025.
 1. Program strategis ini meliputi penyediaan layanan terpadu melalui program SAPA UMKM,
 2. pemberian 10.000 Kartu Usaha Afirmatif untuk masyarakat rentan dan 15.200 Kartu Usaha Produktif ,
 3. transformasi usaha mikro melalui pendampingan NIB dan sertifikasi lainnya,
 4. *re-design* PLUT-KUMKM dan pengembangan rumah kemasan,
 5. penguatan UMKM dalam rantai pasok melalui Program makan bergizi gratis (MBG),



6. perluasan akses pasar,
7. kemudahan pembiayaan dan investasi,
8. pengembangan sistem pendataan UMKM yang terintegrasi,
9. serta inkubasi dan pendampingan usaha untuk mendorong pengembangan kapasitas UMKM.

Tantangan dan Peluang 2025 sebagai berikut :

Memasuki tahun 2025 ekonomi global diproyeksikan mengalami dinamika kompleks ditandai pemulihan penuh pasca pandemi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan teknologi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada di kisaran 2,5–3,5%, didukung oleh adopsi teknologi seperti AI, *fintech*, dan energi terbarukan. Beberapa isu penting menyangkut *sustainability* seperti ekonomi hijau dan transisi menuju energi bersih. Disisi lain, tantangan inflasi, kebutuhan *reskilling* tenaga kerja akibat otomatisasi, dan ancaman perubahan iklim menjadi perhatian utama.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan stabil dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 5,2% pada tahun 2025, namun, sektor UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun 2025 akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. **Kenaikan tarif PPN menjadi tantangan berat bagi pelaku UMKM** di tengah persaingan bisnis dan ketidakpastian ekonomi global.

Kebijakan ini berpotensi meningkatkan biaya produksi sekaligus melemahkan daya saing produk lokal, terutama bagi pelaku usaha di sektor UMKM.

Terkait kenaikan PPN, tantangan lain yang tak kalah penting adalah penurunan daya beli kelas menengah, yang selama ini menyumbang 60% dari total konsumsi domestik, dapat berdampak besar pada pendapatan UMKM.

Di tengah tantangan, terdapat peluang besar bagi UMKM untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital. Perkembangan teknologi komunikasi membuka jalan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menjangkau pelanggan baru melalui platform digital. Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk menghubungkan UMKM ke dalam ekosistem global, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang pertumbuhan baru. Inovasi menjadi kunci keberhasilan UMKM di tahun 2025. Dengan terus melakukan inovasi, UMKM dapat mendesain organisasinya agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar.

Kolaborasi Hexahelix adalah sbb :

Tahun 2025 menjadi periode yang penting bagi ekonomi Indonesia, di mana UMKM memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan dan kolaborasi multi pihak menjadi kunci dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Kunci utama penguatan UMKM sebagai ekonomi kerakyatan adalah adanya sinergitas dan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan melalui *hexahelix collaborator*.

***Hexahelix stakeholders concept* hadir untuk merangkum semua peran penting dari para pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk bersama-sama bersinergi mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam mendukung UMKM Naik Kelas dan pengembangan ekonomi kreatif.**

Enam elemen *hexahelix* ini mencakup akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan atau agregator.

- Dalam konteks ini, akademisi pada model pentahelix berperan sebagai konseptor,
- sektor swasta berperan sebagai enabler,
- komunitas berperan sebagai akselerator,
- pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus kontroler,
- media berperan sebagai expender.
- Hadirnya agregator serta lembaga keuangan mengkonsolidasikan UMKM berdaya saing global.

Penguatan UMKM tidak bisa dilepaskan dari peran *hexahelix* dalam mewujudkan ekosistem pendampingan UMKM yang berkelanjutan, memfasilitasi UMKM mengakses sumber daya produktif seperti permodalan, digitalisasi, produksi, penguatan kapasitas dan kelembagaan, dll. Karena itu perlu upaya semua pihak menginisiasi dan mewujudkan sinergi *hexahelix* pada berbagai tingkatan di level daerah, propinsi, nasional, dalam dan luar negeri. Tujuan utama adalah untuk mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta mendorong inovasi.

Dukungan komprehensif elemen *hexahelix* menjadi kunci dalam mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi *hexahelix* yang kuat, dan komitmen pada inovasi, UMKM dapat terus menjadi motor penggerak utama bagi perekonomian nasional. Mari menyongsong tahun 2025 dengan optimisme dan

semangat kolaborasi untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih tangguh dan berdaya saing.

APBN PENGEMBANGAN UMKM

Artikel berjudul *Inovasi Penyaluran APBN untuk UMKM di Sektor Ekonomi Kreatif* pada situs Menkeu , hai.djpb@kemenkeu.go.id, antara lain mengungkapkan bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif.

Sektor ini memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian nasional, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM di sektor ini menuntut pendekatan baru dalam implementasi kebijakan.



Peran APBN dalam Mendukung UMKM Ekonomi Kreatif

Penyaluran APBN untuk UMKM di sektor ekonomi kreatif dilakukan melalui berbagai program, termasuk pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, fasilitasi pemasaran, dan penguatan ekosistem digital. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak seperti lembaga keuangan, startup teknologi, dan komunitas kreatif untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan

memberikan dampak maksimal.

Salah satu bentuk inovasi yang mulai diterapkan adalah integrasi teknologi dalam proses penyaluran dana. Sistem berbasis digital memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir. Selain itu, platform digital juga membantu pelaku UMKM mengakses pendanaan secara lebih mudah dan cepat.

Inovasi dalam Penyaluran APBN adalah sbb :

1. Digitalisasi Proses Penyaluran

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk mempermudah pendaftaran, verifikasi, dan pelaporan penggunaan dana APBN. Hal ini juga mempermudah pemantauan oleh pemerintah untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya.

2. Program Inkubasi Kreatif

Pemerintah dapat mengalokasikan dana APBN untuk mendirikan pusat-pusat inkubasi yang fokus pada pengembangan UMKM di sektor ekonomi kreatif. Inkubasi ini mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan akses ke pasar nasional maupun internasional.

3. Kemitraan dengan *Platform* Digital

Menggandeng e-commerce dan platform teknologi lainnya untuk membantu UMKM memasarkan produk secara lebih luas. Dana APBN digunakan untuk mendukung biaya promosi dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.

4. Pendanaan Berbasis Kinerja

Model penyaluran yang didasarkan pada pencapaian kinerja UMKM. Misalnya, UMKM yang mampu meningkatkan omzet atau membuka lapangan kerja baru mendapatkan insentif tambahan.

5. Fokus pada Keberlanjutan

Memberikan prioritas kepada UMKM ekonomi kreatif yang mengusung prinsip keberlanjutan, seperti penggunaan bahan baku ramah lingkungan atau pengurangan limbah produksi.

Tantangan dan Solusi adalah sbb :

Meski inovasi terus dilakukan, tantangan dalam penyaluran APBN tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Solusi yang dapat diterapkan adalah menyelenggarakan pelatihan intensif secara berkala, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh teknologi secara merata. Selain itu, perlunya pengawasan yang ketat dan audit independen untuk memastikan dana APBN digunakan secara efektif dan efisien.

Dampak Inovasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sbb :

Inovasi dalam penyaluran APBN dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan akses yang lebih baik terhadap pendanaan dan ekosistem yang mendukung, UMKM di sektor ini dapat menciptakan produk berkualitas tinggi, menembus pasar internasional, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berbasis keterampilan kreatif.

Inovasi dalam penyaluran APBN untuk UMKM di sektor ekonomi kreatif merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan yang adaptif, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif. Ke depannya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas kreatif menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi sektor ini.

STRATEGI KABINET UNTUK PENGEMBANGAN UMKM

Firman Hidranto, 2025, menyajikan artikel *UMKM Didorong Naik Kelas di Era Presiden Prabowo*, sumber *Indonesia.go.id*, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintah akan mendorong UMKM naik kelas dengan menciptakan integrasi yang kuat di seluruh rantai pasok.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

Pada saat pelantikan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menyatakan visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Visi ini diwujudkan dengan mengatasi berbagai hambatan yang selama ini mengganjal perkembangan sektor usaha kecil, termasuk akses pendanaan.

Dalam mendukung visi presiden, Menteri UMKM Maman Abdurrahman segera mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM.

- Salah satu masalah terbesar itu adalah akses terhadap pendanaan.
- Menurut Menteri Maman, Presiden Prabowo menginginkan terciptanya *supply chain* yang solid antara industri kecil, menengah, dan besar, sehingga UMKM dapat benar-benar berperan sebagai pilar ekonomi nasional.
- Kabinet akan mendorong UMKM naik kelas dengan menciptakan integrasi yang kuat di seluruh rantai pasok.

Untuk mendukung target pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- menyiapkan kebijakan berupa stimulus kredit khusus bagi UMKM yang akan diterapkan pada 2025. Stimulus ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan kredit UMKM yang saat ini masih melambat.



kredit UMKM yang saat ini masih melambat.

- Hingga November 2024, pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 3,7 persen (*year on year/yoy*) dengan total nilai Rp1.405,1 triliun, melambat dibandingkan Oktober 2024 yang tercatat sebesar 4,6 persen.

- Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa regulasi baru

berupa Peraturan OJK (POJK) akan mempermudah akses keuangan bagi UMKM, baik dari bank maupun lembaga jasa keuangan non-bank. Seluruh siklus penyaluran kredit UMKM akan diatur dalam POJK baru ini, termasuk rancangan percepatan proses bisnis dan berbagai kemudahan lainnya.

- Kebijakan OJK juga akan disesuaikan dengan karakteristik bisnis UMKM, sehingga lebih relevan dan aplikatif.
- Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), kredit kepada UMKM menunjukkan tren melambat pada akhir 2024. Kredit usaha mikro misalnya, hanya tumbuh 3,1 persen (*yoy*) dengan nilai Rp638 triliun, turun dari 4,4 persen, pada Oktober 2024.
- Begitu juga dengan kredit usaha menengah mengalami kontraksi sebesar -0,9 persen dengan total pembiayaan Rp307,5 triliun.
- Dari beberapa segmen itu, hanya kredit usaha kecil tumbuh relatif stabil sebesar 7,5 persen (*yoy*) dengan nilai Rp459,6 triliun.
- Pada sisi penggunaan kredit, pertumbuhan kredit investasi UMKM mencapai 11,9 persen. Sementara itu, kredit modal kerja hanya tumbuh 0,9 persen.

Arah Baru Kabinet untuk Pembangunan UMKM sbb:

- Melalui langkah-langkah strategis seperti **peningkatan akses pendanaan, percepatan proses pembiayaan, dan integrasi rantai pasok**, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
- Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak hanya membantu UMKM bertahan, **pemerintah juga membantu agar UMKM berkembang menjadi pelaku usaha yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global**, antara lain dengan terus mendorong sinergi antara UMKM dan industri besar untuk menciptakan keterpaduan dalam perekonomian.
- Dengan komitmen kuat dari pemerintah, UMKM diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Di era Presiden Prabowo Subianto, UMKM tidak hanya dipandang sebagai sektor ekonomi rakyat biasa, tetapi sebagai pilar strategis untuk mewujudkan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
- Melalui berbagai kebijakan progresif dan dukungan konkret, cita-cita untuk membawa UMKM naik kelas kini bukan lagi mimpi, melainkan tujuan yang nyata dan dapat dicapai bersama.

PEMERINTAH MENGATASI MASALAH KREDIT MACET UMKM

Sumber BPKP , 2024, menyajikan artikel berjudul *Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM*, Sumber: Setkab RI/BPMI SETPRES/DNS , antara lain mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

- Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. “Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” ujar Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (05/11/2024).

- Presiden Prabowo menekankan bahwa produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. “Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkap Presiden.
- Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
- Presiden Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka. “Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan



menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucap Presiden.

- Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri.

KEPUTUSAN RAKOR KEMENTERIAN KOPERASI DAN

UKM

Sumber AdminPajak.com, menyajikan artikel berjudul **7 Strategi Pemerintah untuk Pengembangan UMKM 2025 – 2029**, menjelaskan bahwa **Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menjaring masukan dalam upaya pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kewirausahaan, di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan tujuh strategi pemerintah untuk pengembangan UMKM dalam periode tahun 2025 – 2029.**

Rakor ini menjadi salah satu upaya untuk mencapai perencanaan arah kebijakan yang tepat sasaran. Agar dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, perlu ada upaya dan langkah yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pertama, membagi fokus pemberdayaan UMKM menjadi dua kelompok, yakni pendekatan **high touch** pada UMKM yang dapat menjadi katalisator bagi perekonomian

nasional. Selanjutnya, pendekatan *low touch* untuk usaha mikro dan subsisten yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Kedua, mendorong UMKM yang memiliki basis kuat agar dapat dieskalasi skala usahanya dengan menggunakan teknologi modern. Contoh, melalui korporatisasi petani dan nelayan, serta program Rumah Produksi Bersama.

Ketiga, fokus pada sektor *agriculture, aquaculture*, dan *creative economy*.

Keempat, mendukung secara penuh *research and development* (R&D) yang dapat dimanfaatkan UMKM.

Namun, perlu adanya *linkage* antara dunia pendidikan dan industri.

Kelima, merumuskan skema kemitraan antara usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha mikro besar (UMB).

Kita dapat memanfaatkan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) untuk menghubungkan UMKM dengan rantai pasok industri.

Adapun negara Korea Selatan dan Jepang yang perekonomiannya didominasi oleh pelaku UMKM, karena mampu menghubungkan UMKM ke dalam rantai pasok industri.

Suku cadang, bahan baku, dan produk turunan sebaiknya disuplai UMKM, sehingga, industri *brand* besar elektronik, menjadi industri manufaktur saja. Berbeda dengan UMKM di Indonesia, saat ini sebagian besar bersifat soliter dan tidak terhubung ke dalam rantai industri. Mereka sulit mengakses pembiayaan, pasar, dan teknologi modern.

Keenam, memaksimalkan kebijakan 40 persen alokasi belanja pemerintah untuk UMKM. Dengan demikian, pemerintah perlu mengawal data kebutuhan pemerintah yang tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan menjadikannya sebagai basis perencanaan agar mendukung pengembangan UMKM.

Ketujuh, mendorong akses perbankan untuk UMKM. Saat ini pemerintah sedang mengkaji skema *credit scoring* sebagai salah satu usulan alternatif strategi untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi UMKM yang tidak memiliki agunan.

Pemerintah juga mendorong UMKM untuk IPO (*Initial Public Offering*) atau melantai di BEI (Bursa Efek Indonesia). Dari 800 emiten yang sudah *listing* di bursa, UMKM baru 34 unit. Untuk mewujudkan itu, pentingnya inovasi dalam setiap program.

PELAKSANAAN RENCANA

Sumber ANTARA, 2025, menyajikan artikel berjudul Kementerian UMKM targetkan penyaluran KUR Rp300 triliun pada 2025, antara lain menjelaskan bahwa Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat memberikan keterangan usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (24/2/2025).

- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada 2025.
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan subsidi untuk menjaga suku bunga KUR tetap rendah. “Total subsidi KUR yang diberikan sekitar Rp48 triliun, sehingga pengusaha UMKM hanya dikenakan bunga sekitar 6 persen dari yang seharusnya 15 persen,” kata Maman usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 di Bandung, Senin
- Maman menyebut penyaluran KUR pada 2025 ini dilakukan oleh 49 lembaga keuangan dengan mayoritas berasal dari perbankan, baik bank Himbara (himpunan bank milik negara) maupun swasta.
- Dia menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan agar KUR terserap dan dapat diakses optimal melalui sejumlah kebijakan pendukung, termasuk pemberian subsidi bunga dengan mempertimbangkan aspek kualitas.
- Ia juga berharap penyaluran KUR tidak hanya berhenti pada pemberian modal saja, tetapi harus disertai dengan pendampingan sehingga usahanya bisa berkembang. “Karena harapan kami ke depan, kami ingin meningkatkan kualitas dalam pendistribusian KUR. Yang kemarin sudah baik, menjadi lebih baik. Yang kemarin kurang baik, kita buat menjadi baik,” katanya



- Untuk memastikan distribusi yang lebih baik, lanjut dia, Kementerian UMKM telah membagi wilayah pemantauan menjadi beberapa regional, termasuk Jawa I, Jawa II, Kalimantan, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. “Makanya levelnya kita turunkan. Kita akan buat rakor ini sampai tingkat region supaya kita bisa lakukan monitoring bukan hanya di level pusat, tapi betul-betul di wilayahnya masing-masing,” kata dia.

- Lebih lanjut, dia mengatakan Kementerian UMKM menghadapi sejumlah tantangan dalam distribusi KUR pada 2025, di antaranya target penambahan 2,4 juta nasabah baru dan graduasi 1,7 juta usaha dari kategori mikro ke level yang lebih tinggi. “Tapi kalau memang kemarin dulunya dia (pelaku UMKM) masuk dalam kategori ultra mikro, harapan kita dia bisa tumbuh. Jadi ada pertumbuhan dan graduasi,” kata dia.

STRATEGI PEMBANGUNAN UMKM MELALUI KOPERASI UMKM

Artikel 2024 berjudul *Menteri Koperasi: Tahun 2025, Dana Bergulir LPDB-KUMKM Harus Prioritaskan Sektor Produktif*, sumber Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Humas LPDB-KUMKM

www.lpdb.go.id, antara lain mengungkapkan bahwa Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk sektor produktif pada tahun 2025.

- Hal ini disampaikan oleh Menkop Budi Arie Setiadi dalam kegiatan Symposium Koperasi Indonesia di Jakarta, yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Soedarmono dan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia. b“Saya minta kepada Pak Supomo (Direktur Utama LPDB-KUMKM) untuk tahun depan ini dana bergulir harus lebih besar kepada sektor produktif.
- Kita menyongsong tahun 2025 sebagai kebangkitan tahun koperasi Indonesia,” ujar Menkop Budi Arie. Menkop Budi Arie menambahkan, keberadaan koperasi sangat penting karena merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan. “Semua usaha koperasi sektor produktif pasti kami dukung. Untuk itu, kita perlu mengupayakan agar koperasi produksi atau sektor riil mendapatkan dukungan penuh. Koperasi harus fokus karena multiplier efeknya besar bagi pertumbuhan ekonomi, dan ini perlu juga dukungan dana bergulir LPDB-KUMKM,” lanjut Menkop Budi Arie.

Dukungan Dana Bergulir LPDB-KUMKM sebagai berikut :

- Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, menyampaikan komitmennya dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait koperasi sektor produktif.
- Supomo menjelaskan bahwa LPDB-KUMKM siap mengarahkan penyaluran dana bergulir ke sektor produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional. “Kami di LPDB-KUMKM sangat mendukung untuk fokus pada sektor produktif. Sejak awal, LPDB-KUMKM berkomitmen untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Pada tahun 2025, kami akan mengalokasikan dana bergulir yang lebih besar untuk sektor produktif, termasuk koperasi produksi dan sektor riil lainnya,” ujar Supomo.
- Supomo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, koperasi, dan stakeholder lainnya dalam memastikan keberhasilan program ini. “Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan kita untuk menjadikan tahun 2025 sebagai tahun kebangkitan koperasi Indonesia. LPDB-KUMKM akan terus berinovasi dan bertransformasi untuk memberikan layanan terbaik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi,” tambah Supomo.
- Dalam kesempatan tersebut, Supomo juga mengajak seluruh koperasi di Indonesia untuk memanfaatkan dana bergulir LPDB-KUMKM dan berpartisipasi aktif dalam program-program pengembangan koperasi yang ada. “Kami berharap koperasi di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan dana bergulir ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” pungkasnya.

KINERJA PERDAGANGAN 2024

Siaran Pers 2024, Biro Hubungan Masyarakat Kemendag melaporkan tentang artikel berjudul *Raker Mendag dengan Komisi VI DPR RI*,

Bahas Program Kerja Prioritas Kemendag 2025 , antara lain mengungkapkan bahwa Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan tiga program utama Kemendag pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI.

Ketiga program tersebut adalah

- Pengamanan Pasar Dalam Negeri,
- Perluasan Pasar Ekspor, dan
- Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi,

1. Program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, antara lain
 - a. stabilisasi harga dan
 - b. ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
2. Sebagai implementasi jangka pendek, hal ini dijalankan melalui upaya memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
3. Selain itu, Mendag Budi menjelaskan, pengamanan pasar dalam negeri dalam upaya menjaga stabilitas tiga komoditas barang kebutuhan pokok (bapok) di bawah



kewenangan Kemendag, yaitu minyak goreng, tepung terigu, dan ikan.

4. Kemendag juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya, khususnya Badan Pangan Nasional, untuk pemantauan beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, serta cabai,” ungkap Mendag Budi.

5. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung stabilitas harga dan pasokan komoditas, serta menjaga

inflasi.

6. Optimalisasi implementasi bursa minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk membentuk referensi harga CPO.

2. Program Perluasan Pasar Ekspor menekankan upaya penyelesaian perundingan bilateral Indonesia dengan negara mitra.

Terdapat tiga perundingan CEPA yang ditargetkan untuk segera selesai, yaitu

- a. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership (CEPA),
- b. Indonesia-Peru CEPA, dan
- c. Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement (FTA).

Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Indonesia-EU CEPA.

Terdapat 11 perjanjian bilateral, 17 perundingan yang sedang dirundingkan, 13 dalam proses penajakan, serta 27 perjanjian lainnya yang sedang dalam implementasi dan ratifikasi.

Total ekspor Indonesia Januari-Agustus 2024 sebesar 86,4 persen dihasilkan dari ekspor dengan Surat

Keterangan Asal (SKA) preferensi di negara mitra FTA dan 13,51 persen dihasilkan dari ekspor dengan SKA nonpreferensi.

Kabinet akan berpartisipasi pada forum internasional seperti G20 2024 dan APEC yang baru saja dilaksanakan bersama Presiden RI, penyelesaian sengketa dagang pada WTO, peningkatan layanan sistem informasi ekspor, hingga penguatan perdagangan komoditas SRG yang berorientasi ekspor.

3. Program ketiga, yaitu UMKM BISA Ekspor, yang menggunakan pendekatan berbasis sumber daya (resource- based approach) dan pendekatan berbasis pasar (market-based approach). Pendekatan berbasis sumber daya memprioritaskan pendampingan UMKM untuk meningkatkan kualitas usaha.

Hal ini dicapai, antara lain, dengan

- pendampingan inovasi desain melalui Indonesia Design Development Center (IDDC),
- pendampingan eksportir UMKM baru melalui Export Coaching Program (ECP),
- pendampingan perluasan pasar memanfaatkan pusat ekspor, hingga
- Pemberdayakan penyuluh ekspor.



Sementara itu, pendekatan berbasis pasar meliputi :

- pengembangan ekosistem UMKM ekspor,
- fasilitasi pemasaran produk UMKM, maupun peningkatan peran agregator untuk meningkatkan daya saing UMKM ekspor.
- Mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan melalui fasilitasi pameran, market intelligence, maupun penjajakan bisnis intensif dengan calon pembeli di negara tujuan ekspor.

Terkait kinerja perdagangan, surplus pada Oktober 2024 berhasil mempertahankan surplus neraca perdagangan Indonesia secara berturut-turut selama 54 bulan sejak Mei 2024. Surplus perdagangan kumulatif untuk periode Januari—Oktober 2024 mencatatkan surplus USD 24,43 miliar

diiringi neraca perdagangan nonmigas yang surplus selama lima tahun terakhir.

SALAH SATU STRATEGI KEMENDAG 2025

Ulya Hajar Dzakiah Yahya Sumber Warta Ekonomi, 2025, menyajikan artikel berjudul *Didukung Kemendag, Ini Jadwal Program Belanja Ramadhan dan Lebaran 2025* , sumber Warta Ekonomi antara lain mengungkapkan bahwa Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan BAHWA Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung dan turut serta dalam berbagai program belanja untuk menyemarakkan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran 2025. Ada tiga program belanja yang siap digelar secara luring maupun daring, antara lain Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran, *Friday Mubarak*, dan *Ramadan Sale*.

- Mendag Budi menilai setidaknya ada dua manfaat dari kegiatan-kegiatan promosi belanja di momen HBKN tersebut. Pertama, masyarakat bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan dengan harga lebih murah. Kedua, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya peluang besar untuk makin terserap. “Kemendag mendukung pelaksanaan berbagai program belanja yang digagas para pelaku usaha untuk menyambut bulan puasa dan Lebaran 2025. Program-program ini menawarkan berbagai promosi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendukung pelaku UMKM dan ritel modern,” kata Mendag, dikutip dari siaran pers Kemendag, Rabu (26/2).
- Program Friday Mubarak dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari—28 Maret 2025 secara luring di berbagai ritel anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di seluruh Indonesia. Program ini terdiri atas bazar pameran UMKM dan beragam promo, baik harian maupun promo spesial setiap Jumat untuk komoditas barang kebutuhan pokok (bapok) dan kebutuhan sehari-hari masyarakat, selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. “Program Friday Mubarak bertujuan untuk meringankan beban belanja masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi nasional, dan membantu kelancaran penyediaan pangan,” jelas Mendag Budi.
- *Friday Mubarak* digagas Aprindo bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Program ini juga melibatkan lebih dari 150 merek ritel anggota Aprindo. Friday Mubarak diharap akan mencapai total transaksi Rp75-77 triliun.
- Selanjutnya, Program BINA Lebaran dijadwalkan berlangsung pada 14–30 Maret 2025. BINA Lebaran digelar secara serentak di berbagai mal, pusat perbelanjaan, serta berbagai gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) yang ada di stasiun dan bandara di seluruh provinsi di Indonesia. BINA Lebaran terdiri atas program belanja di mal untuk produk makanan dan minuman di kafe dan restoran, bapok, fesyen, elektronik, kebutuhan harian, dan lain-lain; promo di ritel yang mencakup penawaran diskon hingga 70 persen; serta Bazar Ramadan Bina di mal untuk produk UMKM dan merek lokal.
- BINA Lebaran diselenggarakan HIPINDO dan APPBI, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Target transaksi yang diharapkan mencapai angka Rp30 triliun. Sementara itu, berbagai platform niaga elektronik, termasuk platform perjalanan, menawarkan berbagai promosi dan potongan harga sepanjang HBKN. Beberapa platform niaga elektronik telah menjalankan kampanye Ramadan sejak minggu keempat Februari 2025, atau seminggu menjelang bulan puasa, hingga Idulfitri nanti.
- Selain itu, Mendag Budi mendorong para platform penyedia jasa layanan belanja daring untuk mempromosikan produk-produk UMKM secara masif. Hal ini untuk memastikan keberpihakan terhadap UMKM, termasuk produk lokal. “Kemendag akan mendorong platform belanja daring untuk mengutamakan dan mempromosikan produk-produk lokal,” ungkapnya. Mendag Budi menyampaikan, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai promosi daring dan luring yang ditawarkan pada program-program promosi tersebut. Ia berharap, promosi dalam HBKN dapat mendorong

minat belanja dan berbagai diskon dapat mendorong daya beli masyarakat. Sehingga, Ramadan tenang dan menyenangkan karena ada diskon Ramadan.

“Kami harap hal ini dapat memeriahkan bulan puasa dan Lebaran 2025. Kami persilakan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai promosi yang ada,” pungkasnya.